

**KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI
DI PEKALONGAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)**



SKIRPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**WAHYU ARDIYANTO
NIM. C2B607057**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Wahyu Ardiyanto
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607057
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI DI
PEKALONGAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S.

Semarang, 26 Juli 2013

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S.)

NIP. 195809271986031019

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Wahyu Ardiyanto
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607057
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI DI
KABUPATEN PEKALONGAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 1 Juli 2013

Tim Penguji

1. **Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S.** (.....)
2. **Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc. Ph.D.** (.....)
3. **Hastarini Dwi Atmanti, SE., M.Si.** (.....)

Mengetahui
Pembantu Dekan I

**Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1 001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wahyu Ardiyanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI DI PEKALONGAN (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil dari tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Juli 2013

Yang membuat pernyataan

(Wahyu Ardiyanto)

NIM: C2B607057

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk untuk mendukung produksi padi, menganalisis besarnya proporsi pengeluaran untuk pupuk oleh petani dan menganalisis pendapatan bersih yang diperoleh petani disetiap musim tanam. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimana pemilihan responden berdasarkan pertimbangan dari data-data pendukung penelitian. Sampel penelitian ini yaitu seluruh desa di Kecamatan Kesesi dengan jumlah responden 100 petani. Penentuan jumlah responden berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk mengukur efektivitas kebijakan subsidi pupuk digunakan dua indikator utama yaitu tepat harga dan tepat jumlah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk masih dikategorikan belum efektif berdasarkan harga pupuk bersubsidi ditingkat pengecer, hasil penelitian menunjukkan 72,19 persen petani membeli pupuk dengan harga di atas HET yang berlaku. Kemudian selain HET dari segi penggunaan pupuk oleh petani juga belum sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang. Hasil penelitian menunjukkan 62 persen petani penggunaan pupuk petani masih di bawah rekomendasi dan 12 persen di atas rekomendasi yang dianjurkan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kebijakan pupuk bersubsidi masih **belum efektif**. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengeluaran petani, dalam hal ini dari hasil penelitian proporsi pengeluaran pupuk petani yaitu sebesar 11 persen. Pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah pengeluaran untuk tenaga kerja, hal tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Banyaknya pengeluaran akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan diterima petani. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata pendapatan bersih sekali musim tanam dari 100 responden dengan rata-rata luas lahan 3350,1 m² yaitu sebesar Rp 3.899.585.

Kata Kunci : efektivitas, Kebijakan Subsidi Pupuk, HET, Responden, Metode deskriptif kuantitatif, hasil penelitian, pengeluaran, pendapatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the fertilizer subsidy policy to support rice production, analyzing the large proportion of expenditure on fertilizers by farmers and analyze farmers' net income earned in each growing season. This study took a case study on Kesesi District Pekalongan. The sampling method using purposive sampling where the selection of respondents based on consideration of the research supporting data. The research sample is the entire village in the district by the number of respondents Kesesi 100 farmers. Determination of the number of respondents is based on calculations using formulas Slovin. The analytical method used is quantitative methods. To measure the effectiveness of the fertilizer subsidy policy used two main indicators, namely the right price and the right amount.

Results of this study showed that the fertilizer subsidy policy is considered not effective based on the price of subsidized fertilizer level retailers, the results showed 72.19 percent of farmers buy fertilizer at a price above the prevailing HET. Later than HET in terms of the use of fertilizers by farmers are also not in accordance with the recommendations of balanced fertilization. Penelitian results showed 62 percent of farmers use fertilizer farmers are still under the recommendation and 12 percent above the recommended recommendations. From these results we can conclude bersubisi fertilizer policies have not been effective. It can affect farmers' expenditure, in which case the proportion of research expenditure in the amount of fertilizer farmers 11 percent. These expenses are the second largest expense after labor expenses, it will indirectly affect the income of farmers. Amount of expenditure will reduce the amount of revenue that would diiterima farmers. Based on our research the average net income once the growing season of 100 respondents with an average of 3350.1 m² of land amounting to Rp 3,899,585.

Keywords: effectiveness, Fertilizer Subsidy Policy, HET, Respondent, descriptive quantitative methods, research results, expenditures, revenues

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat, karunia, kasih sayang, kecukupan rizki, petunjuk, dan bimbingan-Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Kajian Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)**”. Kebijakan subsidi pupuk merupakan topik yang menarik karena diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap produksi padi dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Dukungan, bantuan, perhatian, serta doa yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
2. Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D. selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang diberikan.
3. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Hadi Sasana, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Segenap dosen-dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan,

bantuan serta kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Bapak Hadi Waluyo selaku Koordinator PPL Kecamatan Kesesi dan Mbak Rini PPL Kecamatan Kesesi yang telah memberi ijin dan bantuan selama penelitian berlangsung.
7. Seluruh Petani dan Pemilik Kios Saprotan di Kecamatan Kesesi yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara sebagai responden dan terima kasih sudah memberikan data yang penulis inginkan.
8. Mas Sutanto di Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan, Bapak dan Ibu di BPS Jawa Tengah, Bapak dan Ibu di BPS Kabupaten Pekalongan, Bapak dan Ibu di Bapeda Kabupaten Pekalongan. Terima kasih atas segala bantuan dan kerja samanya dalam memberikan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Papah dan Mamah tercinta atas segenap didikan, kesabaran, perhatian, dukungan, pengorbanan materiil maupun moril, doa, semangat, dan kasih sayangnya yang begitu besar dan tulus.
10. Keluarga besar Penulis, Mbah Uti, Pakde, Bude, Om, Bulek, Mas, Adek yang tak henti-hentinya memberi nasehat dan wejangan-wejangan yang membangun penulis untuk lebih semangat.
11. Dek Retno yang selalu memberi keceriaan, senyuman, dukungan, motivasi, inspirasi, semangat, perhatian, kasih sayang yang tulus, waktu, tenaga dan semuanya. "I hope you're the one I share my life with. I hope I love you all my life".
12. Kawan-kawan seperjuangan IESP 2007. Terima kasih untuk segala kenangan, kebersamaan dan bantuannya selama penulis menjalani studi di Semarang.
13. Sahabat penulis : Ardi Kendal, Dani, Otis, Ferry, Ilham Pati, Dani Gendut, Adit, Adi, Ade, Hendi, Felix, Risky, Johan, Agus. Terima kasih atas persahabatan indah yang terjalin selama ini. Dari sebelumnya tidak saling kenal jadi kenal. Setelah kenal jadi dekat. Dan semoga walaupun akhirnya terpisah oleh jarak, persahabatan dan tali silaturahmi tetap terjalin dan semoga kita semua sukses dengan jalannya masing-masing.

14. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semarang, 30 Mei 2013

Penulis

(Wahyu Ardiyanto)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUDL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	24
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	25
1.4 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	27
2.1 Gambaran umum tentang Pupuk.....	27
2.1.1 Sejarah Pupuk.....	30
2.1.2 Sejarah Pupuk di Indonesia.....	34
2.1.3 Sejarah Kebijakan Pupuk Bersubsidi.....	34
2.1.4 Pengertian Pupuk Bersubsidi.....	37
2.1.5 Alokasi Pupuk Bersubsidi.....	38
2.1.6 Pengadaan, Penyaluran dan pengawasan Pupuk Bersubsidi.....	40
2.3 Teori Produksi dalam Usaha Pertanian.....	43
2.4 Teori Biaya Produksi.....	45
2.5 Penelitian Terdahulu.....	47
2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	55
3.3 Metode Analisis.....	60
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	63
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	63
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	70

4.2.1	Efektivitas HET Pupuk Bersubsidi.....	70
4.2.2	Dosis Penggunaan Pupuk Bersubsidi.....	85
4.2.3	Analisis Biaya Produksi.....	90
4.2.4	Analisis Pendapatan Bersih Petani Setiap Musim Tanam.....	107
BAB V	PENUTUP.....	111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran.....	113
	Daftar Pustaka.....	114
	Lampiran.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Presentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB tahun 2007-2010.....	2
Tabel 1.2	Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2005-2012.....	8
Tabel 1.3	HET Pupuk Bersubsidi tahun 2012.....	10
Tabel 1.4	Rata-rata Pengeluaran per Musim Tanam per Hektar Usaha Tani Padi Sawah Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2011.....	15
Tabel 1.5	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2010.....	17
Tabel 1.6	Harga Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer di Kabupaten Pekalongan Tahun 2007-2011.....	18
Tabel 1.7	Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2012.....	21
Tabel 2.1	Matrik Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.1	Luas Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Kesesi berdasarkan jenis sistem irigasi tahun 2011.....	58
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011.....	64
Tabel 4.2	Luas Lahan Tanah Sawah di Kecamatan Kesesi tahun 2011.....	66
Tabel 4.3	Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pekalongan tahun 2012.....	67
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kesesi Tahun 2011.....	69
Tabel 4.5	Harga Pupuk Bersubsidi yang diterima Responden.....	71
Tabel 4.6	Persentase Tingkat Ketepatan Harga Pupuk Bersubsidi.....	73
Tabel 4.7	Daftar Harga Tebus Pupuk Bersubsidi dari Produsen.....	81
Tabel 4.8	Daftar Harga Jual Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Kios Pengecer.....	82
Tabel 4.9	Daftar Harga Jual Pupuk Bersubsidi di tingkat Pengecer.....	83
Tabel 4.10	Rekomendasi Dosis Pupuk di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	86
Tabel 4.11	Persentase Ketepatan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.....	87
Tabel 4.12	Perbedaan Pengeluaran Pupuk Subsidi dan Non Subsidi pada setiap Musim Tanam.....	105
Tabel 4.13	Rata-rata Biaya yang digunakan dan Pendapatan sekali musim tanam dari 100 Responden di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Produksi Nasional Tahun 2002-2012.....	9
Gambar 2.1	Kerangka Teoritis.....	53
Gambar 4.1	Luas Lahan Responden.....	65
Gambar 4.2	Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi.....	80
Gambar 4.3	Alur Perubahan Harga Pupuk Bersubsidi per Lini.....	84
Gambar 4.4	Proporsi Biaya Produksi Usaha Pertanian Padi Sawah.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meskipun demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Indonesia tergantung padanya.

Saat ini sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana dapat dilihat dari data terbaru yang telah dipublikasikan, yaitu pada Tabel 1 (BPS, 2009) terbukti bahwa persentase penyerapan PDB pada sektor ini cukup besar yaitu tahun 2007 sebesar 13,72% dan kontribusi tersebut terus naik di tahun 2008-2010. Walaupun masih menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan namun dibandingkan dengan sektor industri pengolahan, sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi apabila dikelola secara profesional dan transparan.

Tabel 1.1
Presentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB tahun 2007-2010

Sektor Lapangan usaha	2007	2008	2009	2010
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13,72%	14,46%	15,29%	15,92%
Pertambangan dan Pergalian	11,15%	10,92%	10,54%	11,04%
Industri Pengolahan	27,05%	27,89%	26,38%	25,19%
Listrik, Gas, Air Bersih	0,88%	0,82%	0,83%	0,79%
Konstruksi	7,72%	8,48%	9,89%	10,11%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,99%	13,97%	13,37%	13,80%
Pengangkutan, dan Komunikasi	6,69%	6,31%	6,28%	6,23%
Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	7,73%	7,43%	7,20%	7,09%
Jasa-jasa	10,08%	9,73%	10,22%	9,82%

Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka Negara Indonesia mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan pemantapan di sektor pertanian juga semakin diperkuat.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, diantaranya yaitu, potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya

penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah kebutuhan akan pangan secara langsung juga akan ikut bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut petani untuk meningkatkan produksinya. Dengan peningkatan produksi pertanian diharapkan kesejahteraan petani juga akan meningkat.

Mensejahterakan petani sebagai aktor produsen pangan bukanlah sasaran ikutan dari upaya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi prasyarat utama agar upaya tersebut dapat dicapai dan terjamin keberlangsungannya. Swasembada beras yang mungkin dicapai pada beberapa tahun terakhir ini dirasakan sangat rapuh, karena dicapai dengan subsidi yang sangat besar (Benyamin Lakitan, 2010).

Hasil penelitian Dwidjono (2005) mengungkapkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, maka diperlukan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek masih diperlukan yaitu dengan melakukan kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor, namun hendaknya didukung dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan luas panen, baik dengan

perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan sarana irigasi dan input pertanian terutama di daerah penghasil beras, seperti Jawa, Sumbar, dan Sulsel. Kemudian untuk kebijakan jangka panjang, kebijakan peningkatan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap, namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai dengan upaya penganekaragaman konsumsi atau pangan sehingga mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras. Pengembangan agroindustri untuk mendorong berkembangnya agroindustri rumah tangga sehingga meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan umumnya dan petani menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat, yaitu terkait dengan aspek teknologi, lahan pertanian dan modal manusianya.

Pupuk telah senantiasa berada di lini depan dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan dunia dan mungkin lebih dari pada jenis input yang lain, secara luas bertanggung jawab bagi keberhasilan yang telah dicapai. Hanya tanah-tanah yang subur yang merupakan tanah produktif. Apabila hara tanaman rendah, produktifitas tanah dan hasil tanaman rendah. Jadi dengan memasok hara tanaman yang esensial bagi produksi tanaman yang tinggi, pupuk telah menjadi vital untuk produksi tanaman (Melda R. Sirait, 2008).

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi petani. Keberadaan pupuk secara tepat baik jumlah, jenis, mutu, harga, tempat, dan waktu akan menentukan kuantitas dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Seiring dengan dikembangkannya varietas unggul dan varietas

hibrida yang cenderung responsif terhadap penggunaan pupuk anorganik, dimana efisiensi dan efektivitasnya tergantung pada lokasi setempat.

Menurut Syahyuti (2007), peranan pupuk sangat signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan kualitas hasil komoditas pertanian. Ketersediaan pupuk hingga di tingkat petani penting untuk dilakukan dengan memenuhi azas enam tepat yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/04/2007 tentang penyempurnaan dan revisi rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Disamping itu, efektivitas penggunaan pupuk di tingkat petani juga dilakukan dengan mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik.

Pupuk merupakan sarana produksi dalam sektor pertanian yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian, sehingga pupuk mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan (beras), meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan sebagai penyedia unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi yang ketersediaannya disubsidi oleh pemerintah untuk petani, termasuk petani yang

kebutuhan per sub sektor dan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011.

Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi gabahnya. Tetapi penggunaan pupuk memerlukan biaya, dan biaya tersebut merupakan beban bagi petani dalam proses produksi. Karena itu pada satu sisi pemerintah bermaksud membantu beban biaya pupuk petani dan mendorong peningkatan produksi gabah mereka. Sementara pada sisi lain pemerintah menganggap pupuk memiliki peran sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional. Mengingat peranan pupuk yang sangat strategis, maka penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani merupakan masalah yang krusial. Oleh karena itu, harga pupuk tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya karena harga pupuk yang tercipta kemungkinan besar tidak terjangkau oleh petani. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah masih merasa perlu untuk memberikan subsidi harga terhadap penyediaan pupuk melalui penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), atau dikenal juga dengan istilah "Ceiling Price".

Program pemberian pupuk bersubsidi sudah dimulai sejak tahun 1970-an, tujuannya kebijakan ini adalah untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, tersedia dengan harga yang terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa

memanfaatkan teknologi pupuk ini karena kurang mampu membeli sesuai dengan harga pasar. Sehingga pemerintah Indonesia yang berkepentingan dalam peningkatan produktifitas hasil pangan demi ketahanan pangan Nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani (Pangi Syarwi, 2011).

Subsidi pupuk ini diberikan pemerintah melalui subsidi harga gas kepada industri pupuk. Cara ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu harga eceran tertinggi (HET). Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 87 / Permentan/SR.130/12/2011 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan HET pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET di tingkat pengecer resmi.

Namun pada kenyataannya petani sebagai penerima manfaat program ini masih sulit untuk mengaksesnya. Petani kerap kali menemukan pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Berdasarkan regulasi saat ini, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah ditetapkan dan ditataniagakan dengan HET melalui penyaluran resmi.

Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal sehingga menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan lebih jauh lagi akan menurunkan tingkat pendapatan

petani. Karena pentingnya pupuk bagi pertumbuhan pertanian, khususnya pangan seperti padi, sejak era Orde Baru hingga saat ini pemerintah telah memberikan subsidi pupuk.

Kesuksesan subsidi harga pupuk mendorong peningkatan penggunaan pupuk dan merembet terhadap peningkatan produksi beras, merupakan bukti bahwa sesungguhnya petani memberikan respon yang positif terhadap harga input produksi. Akan tetapi sukses ini membawa konsekuensi pembengkakan subsidi yang diberikan pemerintah (Amang, 1995).

Kebutuhan pupuk yang meningkat mendorong pemerintah untuk menaikkan subsidi pupuk, hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga harga pupuk agar tetap bisa dijangkau petani yang sebagian besar bermodal terbatas.

Tabel 1.2
Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2004-2012

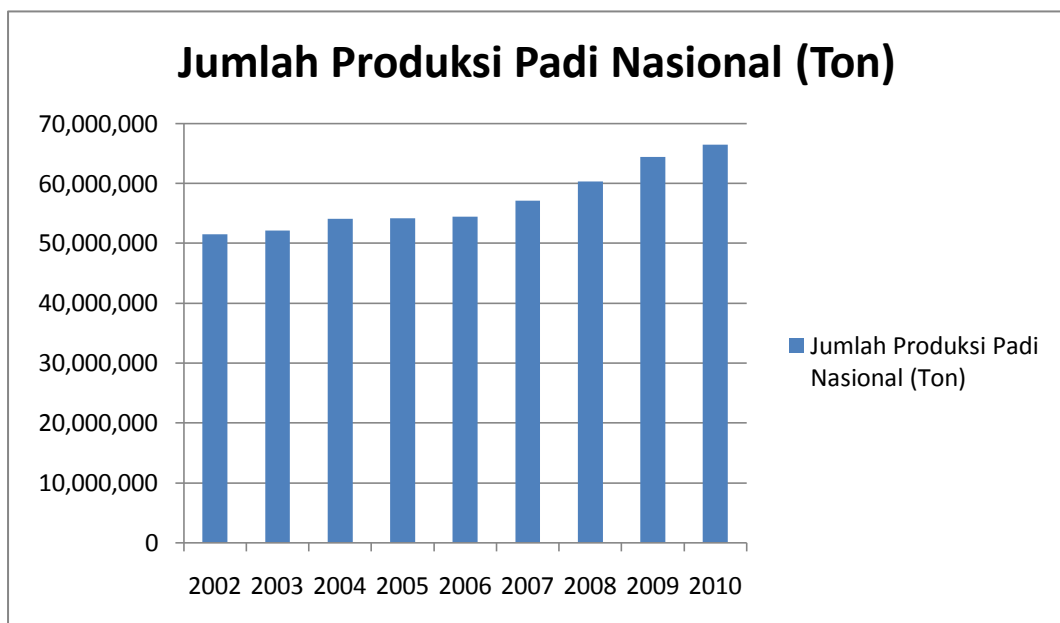
Tahun	Anggaran (Triliyun)
2004	1,59
2005	2,59
2006	4,18
2007	6,79
2008	14,1
2009	17,3
2010	11,29

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

Dari data di atas terlihat bahwa alokasi subsidi pupuk setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2009. Namun, pada tahun 2010 alokasi subsidi pupuk mengalami penurunan dari sebesar 17,3 (triliyun rupiah) pada tahun 2009, menjadi 11,29 (triliyun rupiah) pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya anggaran negara yang digunakan untuk subsidi pupuk

yang terlalu besar dan juga adanya indikasi penyimpangan dan ketidakefektifan dalam penggunaan subsidi pupuk ini untuk mendukung sektor pertanian. Pengaruh adanya subsidi pupuk terhadap produksi padi akan ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Jumlah Produksi Nasional Tahun 2002-2010



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Setelah sempat dihentikan pada tahun 1998 subsidi pupuk mulai diberlakukan kembali pada tahun 2002, dengan adanya pemberlakuan subsidi pupuk kembali, produksi padi juga meningkat sejak tahun 2002 sampai 2009. Namun, pada tahun 2010 terjadi pengurangan anggaran subsidi pupuk dari sebesar 17,3 (triliyun rupiah) pada tahun 2009 menjadi sebesar 11,29 (triliyun rupiah) pada tahun 2010 yang dijelaskan pada Tabel 1.2. Pengurangan subsidi pupuk dengan selisih sebesar 6,01 (Triliyun rupiah) ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan produksi padi bahkan produksi padi tetap

mengalami peningkatan dari sebesar 64.398.890 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 65.980.670 ton pada tahun 2010. Hal ini mengindikasikan adanya pertanyaan terhadap tingkat efektivitas penyerapan subsidi pupuk terhadap sektor pertanian.

Sedangkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi 2012 tercantum dalam Permentan No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 2012. Pada tahun 2012, Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di kios pengecer resmi, di tingkat kecamatan/desa ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
HET Pupuk Bersubsidi tahun 2012

Jenis Pupuk	Harga (Rp/Kg)
UREA	1800
ZA	1400
SP-36	2000
NPK (Pupuk Majemuk)	2300
Organik	500

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

Adapun masalah yang sering dihadapi oleh petani, adalah ketidakmampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasakan sangat mahal, selain itu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani, masih banyak petani yang mengeluhkan harga pupuk ditingkat pengecer tidak sesuai HET yang berlaku. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan tetapi tetap ada harga yang

berbeda di pasar dan merugikan petani. Sebagai contoh kasusnya yaitu pada Kabupaten Gresik dimana harga pupuk yang berlaku tidak sesuai dengan HET. Pupuk urea yang seharusnya dijual dengan harga Rp 80.000/sak, tetapi pada kenyataannya harganya sebesar Rp 87.000/sak sehingga terdapat kenaikan sebesar 8,7 persen dari harga sesungguhnya. Selain itu, kondisi ini juga terjadi pada harga pupuk jenis lain yaitu pupuk SP36 dengan HET Rp 100.000/sak dijual dengan harga Rp 108.000/sak (kenaikan harga sebesar 8 persen), sedangkan pupuk NPK Phonska dengan HET Rp 115.000/sak dijual dengan harga Rp 122.000/sak dengan kenaikan harga sebesar 6,09 persen (Jurnal Berita, 2011). Salah satu hal yang menjadi alasan bagi para pelaku distribusi menaikkan harga secara tidak resmi adalah untuk mendapatkan margin pemasaran dari upah pelaku distribusi dan biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi yang kurang realistis. Kenaikan harga ini akan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi di pasar lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kasus tersebut merupakan masalah yang seringkali timbul pada saat musim tanam tiba. Perubahan harga yang terjadi di kios-kios pengecer dirasakan berat oleh para petani, karena jika diperhitungkan hasil panen yang mereka dapat hampir sebagian besar dipergunakan untuk membayar pupuk dan bibit yang mereka gunakan pada saat musim tanam. Hal ini berdampak langsung pada biaya produksi yang harus dikeluarkan petani untuk membeli pupuk bertambah, sedangkan harga jual padi selalu mengalami fluktuasi sehingga pendapatan petani turun bahkan mengalami kerugian.

Selain itu permasalahan lain yaitu dalam penggunaan pupuk, sebagian besar petani belum bisa menerapkan sistem pemupukan berimbang, dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan kemampuan permodalan petani sangat terbatas dalam membiayai kebutuhan usahatannya.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemakaian pupuk bersubsidi oleh petani. Permasalahan yang pertama yaitu, pemakaian pupuk di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam hal ini pupuk yang biasa digunakan petani yaitu pupuk Urea. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha. Perilaku pemupukan demikian secara finansial sangat merugikan petani itu sendiri. Menurut Purbayu Budi Santoso (2010), sikap petani yang boros dalam menggunakan pupuk merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan pupuk. Penggunaan pupuk berlebih terjadi karena petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl hanya merupakan pupuk pelengkap (Adnyana dan Kariyasa, 2000). Sehingga seringkali dijumpai banyak petani yang tidak menggunakan pupuk KCl di samping karena harganya memang relatif mahal.

Permasalahan yang kedua yaitu, pemilikan lahan yang sempit (< 0.3 ha) juga menyebabkan penggunaan pupuk kalau dikonversi ke dalam satu hektar menjadi sangat tinggi. Ketiga, tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas

pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan.

Keempat, adanya ketidakdisiplinan petani dalam menentukan pola tanam. Sebagai contoh, pada daerah tertentu yang biasanya menanam padi dua kali, ketika begitu masih ada persediaan air yang mencukupi pada gardu dua (MK II) petani pada umumnya menanam padi lagi, sehingga terjadi lonjakan permintaan pupuk. Kebutuhan pupuk pada tanaman hortikultura juga sangat sulit untuk dihitung, mengingat jenis komoditas yang ditanam petani tidak pasti dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar. Kelima, terjadi penggunaan pupuk di tingkat petani untuk kebutuhan lain yang tidak masuk dalam sasaran pupuk bersubsidi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) di sepuluh daerah menyatakan masih terdapat banyak permasalahan pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran/distribusi, dan pengawasan dari pelaksanaan program pupuk bersubsidi periode 2009-2011. Pada aspek pendataan ditemukan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak valid, di mana terdapat pengelembungan (mark up) luas lahan dengan jumlah petani. Pada aspek penganggaran misalnya, ditemukan audit yang mengoreksi jumlah perhitungan subsidi karena dihitungnya jumlah volume pupuk delivery order (DO) yang belum disalurkan. Selain itu juga

karena ada biaya-biaya yang tidak termasuk komponen-komponen produksi dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) menjadi dasar perhitungan nilai subsidi pupuk.

Pada aspek penyaluran juga ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO, keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait dengan aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat propinsi maupun kabupaten tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka dinilai tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.

Menurut temuan tim PATTIRO, di lapangan sedikitnya ada 6 persoalan yang menjadi penghambat pada hasil pertanian yang maksimal. Keenam tersebut diantaranya yaitu petani membeli pupuk bersubsidi dengan harga diatas ketentuan HET (Harga Eceran Tertinggi) berkisar mulai 200-500 rupiah, terdapat kelompok tani (poktan) yang sebagian anggotanya bukan petani, sejumlah pengecer menjual bebas pupuk bersubsidi kepada petani yang bukan menjadi tanggung jawabnya, terdapat distributor yang menyalurkan pupuk bersubsidi ke wilayah berbeda, penyaluran pupuk yang kadang mengalami

keterlambatan hingga 1 minggu, juga tidak ada unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa belum terpenuhinya prinsip 6 tepat yaitu tidak tepat harga, dengan keadaan tersebut dikawatirkan ketahanan pangan tidak akan tercapai. Pada dasarnya tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usahatannya, masih terkendala pada ketidaktepatan azas enam tepat di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten.

Tabel 1.4
Rata-rata Pengeluaran per Musim Tanam per Hektar Usaha Tani Padi Sawah Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2011

Rincian	Nilai (Rp)	Biaya (%)
Bibit/Benih	205.540	3,46
Pupuk	786.420	13,26
Pestisida	180.150	3,05
Tenaga Kerja	1.586.010	26,73
Sewa Lahan	734.000	12,37
Alat/Sarana Usaha	463.000	7,80
Jasa	1.553.000	26,18
Lainnya (Bunga Kredit, Iuran Irigasi, PBB Lahan sawah, dan lain-lain)	424.000	7,15
Jumlah	5.932.720	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan enam indikator, antara lain tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan harga sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Efektivitas subsidi pupuk menjadi hal yang penting dalam mendukung produksi sektor pertanian. Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa pupuk mempunyai proporsi sebesar 13,26 persen terhadap keseluruhan biaya produksi padi per hektar pada setiap musim tanamnya. Hal

ini menunjukkan bahwa pupuk mempunyai proporsi yang besar dalam biaya produksi padi sehingga pupuk menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan petani. Pupuk menjadi input yang perlu disubsidi pemerintah terkait dengan peranannya yang penting dalam menentukan produksi pertanian.

Padi merupakan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan data BPS menunjukan dari tahun 2009 sampai tahun 2010 untuk tanaman padi sawah mengalami peningkatan luas panen sebesar 15,59 persen. Kenaikan luas panen tersebut memberi dampak terhadap naiknya produksi padi sebesar 24,81 persen. Penggunaan input dan sistem pertanian yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan kenaikan tersebut, terutama dalam penggunaan pupuk berimbang menjadi salah satu tolok ukur efisiensi dari proses produksi pertanian padi sawah. (Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Pekalongan.

Di dalam PDRB sektor pertanian kabupaten Pekalongan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri. Berdasarkan Tabel 1.5 sektor pertanian menyumbang 19,90 persen pada tahun 2009, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi 20,71 persen. Dibandingkan dengan sektor lain sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 0,81 persen.

Tabel 1.5
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2010

Sektor	2009	2010
Pertanian	19,90 %	20,71 %
Pertambangan dan Penggalian	1,04 %	0,96 %
Industri Pengolahan	27,25 %	26,85 %
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,38 %	1,36 %
Konstruksi	6,20 %	6,13 %
Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,76 %	18,68 %
Pengangkutan dan Komunikasi	3,80 %	3,84 %
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	4,80 %	4,75 %
Jasa-jasa	16,87 %	16,72 %
Total	100 %	100 %

Sumber : PDRB Kabupaten Pekalongan 2010

Akan tetapi pembangunan pertanian di Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari adanya masalah yang dihadapi salah satunya yaitu, masalah pupuk bersubsidi. Mengutip dari harian Suara Merdeka edisi Senin tanggal 3 Oktober 2005 harga sarana produksi padi (saprodi) baik pupuk maupun obat-obatan selama ini belum sesuai dengan harga eceran sebagaimana ketentuan pemerintah. Harga pupuk ataupun obat-obatan sering tak sesuai dengan harga dasar yang diatur pemerintah. Seperti jenis pupuk bersubsidi, harga dasar urea yang ditetapkan pemerintah Rp 105.000/kuintal dalam praktiknya Rp 120.000 - Rp150.000/kuintal. Lebih parah lagi petani tidak tahu berapa harga eceran obat-obatan saat ini menurut ketentuan pemerintah.

Tabel 1.6
Harga Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer Di Kabupaten Pekalonga Tahun 2007-2011

	(Rp/Kg)				
Tahun	UREA	ZA	SP-36	NPK	Organik
2007	1300	1150	1650	1800	1000
2008	1300	1150	1650	1800	600
2009	1350	1150	1650	1800	600
2010	1700	1500	2100	2400	600
2011	1750	1500	2100	2500	600

Sumber : Survey Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan survey yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan menunjukkan harga di tingkat pengecer selalu mengalami kenaikan. Selain itu harga tersebut masih di atas HET yang berlaku pada masing-masing tahun, rata-rata besarnya selisih yaitu Rp 120/Kg dari masing-masing tahun. Salah satu hal yang menjadi alasan bagi pengecer menaikkan harga secara tidak resmi adalah untuk mendapatkan margin pemasaran dari pengecer dan biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi yang kurang realistis. Kenaikan harga ini akan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi di pasar lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Harga saprodi yang tinggi saat musim tanam merupakan masalah klasik petani saat memasuki musim tanam. Selain masalah tersebut, petani juga mempunyai permasalahan tentang pola kemitraan yang tidak seimbang dengan konsumen, harga gabah yang selalu anjlok saat musim panen. Hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya pendapatan yang akan diterima oleh petani.

Disamping masalah harga pupuk bersubsidi masalah lain yaitu dosis penggunaan pupuk oleh petani yang tidak sesuai dengan aturan pemupukan

berimbang. Mengutip dari harian Suara Merdeka edisi Jumat 5 Desember 2008 Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan Haryanto di Pekalongan mengatakan, dari hasil penelitian kebutuhan pupuk urea bersubsidi dalam satu hektare lahan mencapai 250 kg-300 kg tetapi mereka cenderung berlebihan menggunakan pupuk dua kali lipat dari jumlah itu. Beliau juga menerangkan "Saat ini, para petani cenderung melakukan pemupukan tanaman padi hingga mencapai 400-500 kilogram sehingga kebutuhan pupuk melonjak. Padahal pemakaian pupuk secara berlebihan juga bisa menimbulkan tanah tidak subur".

Peningkatan input produksi berupa penambahan penggunaan pupuk secara teori dapat meningkatkan produksi padi apabila penggunaannya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan pada setiap produksinya (Purwono dan Heni, 2009). Namun apabila penambahan pupuk untuk produksi sudah pada batas optimum penggunaan maka apabila dilakukan penambahan lagi akan berakibat negatif pada peningkatan produksi. Seringkali petani tidak memperhatikan dosis anjuran yang tepat untuk setiap penggunaannya berkaitan dengan luas lahan yang mereka miliki sehingga berakibat pada penurunan produktivitas pada hasil produksinya (Kementerian Pertanian, 2009).

Berdasarkan data BPS, Kecamatan Kesesi merupakan penyumbang produksi padi terbesar di Kabupaten Pekalongan. Dengan luas panen sebesar 8.662 Ha dapat menghasilkan produksi padi sebesar 46.861 ton, jika dihitung rata-rata per Hektar dapat menghasilkan 5,4 ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan sawah di Kecamatan Kesesi mempunyai produktivitas yang cukup

tinggi. Dari segi sarana prasarana pendukung produksi padi kecamatan Kesesi cukup bagus yaitu tersedianya sistem irigasi teknis dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu input produksi merupakan salah satu penentu dari proses produksi, misalnya pupuk.

Tingginya produksi lahan sangat tergantung dengan penggunaan input dan tersedianya sarana prasarana pendukung. Semakin luas lahan sawah garapan maka kebutuhan akan input terutama pupuk juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 1.7 data Dinas Petanian Kabupaten Pekalongan jumlah kebutuhan pupuk di Kecamatan Kesesi sebesar 2.558 ton untuk pupuk urea, angka tersebut merupakan angka terbesar diantara 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, sedangkan alokasi untuk pupuk ZA yaitu sebesar 180 ton, 689 ton untuk SP-36, 1.678 ton untuk pupuk NPK (pupuk Majemuk), dan 348 ton untuk pupuk Organik.

Tabel 1.7
Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pekalongan tahun 2012

No.	Kecamatan	Satuan Ton				
		Urea	ZA	SP-36	NPK	Organik
1.	Kandangserang	824	14	132	35	85
2.	Peninggaran	1.166	11	124	157	156
3.	Lebakbarang	390	1	3	37	13
4.	Petungkriyono	301	1	16	68	19
5.	Talun	871	23	202	334	119
6.	Doro	1.567	95	322	752	231
7.	Karanganyar	1.256	138	607	770	164
8.	Kajen	1.581	901	1.270	2.415	504
9.	Kesesi	2.558	180	689	1.678	348
10.	Sragi	1.670	267	322	1.309	433
11.	Siwalan	1.004	30	154	199	495
12.	Bojong	1.630	215	202	703	114
13.	Wonopringgo	849	80	144	270	125
14.	Kedungwuni	1.096	73	127	205	32
15.	Karangdadap	1.052	100	177	302	392
16.	Buaran	603	1	38	84	13
17.	Tirto	794	206	229	292	29
18.	Wiradesa	912	425	186	781	116
19.	Wonokerto	993	1	80	168	49

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan

Besarnya kebutuhan input pupuk tersebut dapat memunculkan berbagai masalah, diantaranya yaitu tingkat harga jual pupuk bersubsidi yang meningkat lebih tinggi dari HET yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena tingginya permintaan akan pupuk bersubsidi. Tingginya harga pupuk akan sangat memberatkan petani dalam biaya produksinya, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan bersih yang akan diterima oleh petani tersebut.

Selain itu dari sisi petani adanya kebiasaan penggunaan pupuk urea yang berlebihan dapat mengurangi tingkat efisiensi biaya produksi, dari Tabel 1.7 menunjukkan penggunaan jenis pupuk terbesar oleh petani di kecamatan Kesesi yaitu jenis pupuk urea dengan angka alokasi sebesar 2.558 ton, angka

tersebut merupakan angka terbesar diantara 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut menunjukkan petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan NPK hanya merupakan pupuk pelengkap. Kebutuhan pupuk urea bersubsidi dalam satu hektar lahan mencapai 250 kilogram-300 kg tetapi mereka cenderung berlebihan menggunakan pupuk dua kali lipat dari jumlah itu.

1.2 Rumusan Masalah

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus diantaranya kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET, dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk

bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Bustanul Arifin (2004) menyatakan persoalan besar yang dihadapi petani Indonesia saat ini adalah kelangkaan dan menghilangnya pupuk di beberapa daerah, karena terdapat kesenjangan (*gap*) antara jumlah kebutuhan dan pasokan pupuk. Masalahnya kelangkaan pupuk berkaitan dengan faktor disparisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga aktual di lapangan, ketidaktepatan subsidi dan persoalan internal dalam industri pupuk seperti efisiensi, penentuan harga pokok penjualan dan budaya perusahaan perlu juga diperhatikan.

Pemerintah, Produsen, Distributor dan Pengecer merupakan lembaga yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jika pengadaan dan penyaluran pupuk tidak memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu, maka upaya ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai. Untuk itu diharapkan realisasi peraturan pupuk di jadikan patokan bagi produsen, distributor dan pengecer (Adnyana dan Kariyasa, 2000).

Dari berbagai uraian dan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana efektifitas kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan indikator tepat harga di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana efektifitas kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan indikator tepat jumlah penggunaan pupuk oleh petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
3. Berapa besar proporsi pengeluaran petani untuk membeli pupuk di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
4. Berapa besar pendapatan petani setiap masa panen di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis efektifitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan indikator tepat harga di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis efektifitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan indikator tepat jumlah penggunaan pupuk oleh petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
3. Menganalisis besarnya proporsi pengeluaran petani untuk membeli pupuk di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
4. Menganalisis tingkat pendapatan setiap masa panen petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dalam mengembangkan potensi sektor pertanian pangan
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
3. Sebagai bahan informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi Latar belakang masalah pertanian di Indonesia secara umum, dan selanjutnya menjelaskan masalah-masalah khusus tentang pupuk bersubsidi dan dilengkapi berbagai kasus yang terjadi khususnya di daerah penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi berbagai teori-teori pendukung penelitian dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis-jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab empat ini berisi tentang penjelasan mengenai karakteristik daerah penelitian dan juga berisi jawaban-jawaban dan pembahasan permasalahan utama yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari berbagai masalah utama dalam penelitian dan berbagai saran pemecahan masalah tersebut.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum tentang Pupuk

Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan melalui tanah atau disemprotkan ke daun (Wikipedia Indonesia, 2009).

Dalam arti luas yang dimaksud pupuk ialah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanah.

Sedangkan menurut Nasih (2010) Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman. Bahan tersebut merupakan mineral atau organik, dihasilkan oleh alam atau diolah oleh manusia di Pabrik. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B.

TokoPupuk.net lebih lanjut menerangkan bahwa pupuk adalah salah satu dari sejumlah besar bahan alami dan sintetis, termasuk unsur nitrogen, fosfor dan senyawa kalium, yang menyebar pada atau bekerja dalam tanah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Pupuk diberikan agar tanaman dapat tumbuh berkembang dan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Manusia selalu menuntut lebih terhadap kemampuan tanaman. Rekayasa genetik dan lingkungan dilakukan agar tanaman dapat memberikan kinerja yang lebih baik.

Menurut Melda R. Sirait (2008) menjelaskan bahwa pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terhisap oleh tanaman. Jadi, memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah (pupuk akar) dan tanaman (pupuk daun).

Pupuk pertama kali digunakan oleh petani kuno, teknologi pupuk dikembangkan secara signifikan sebagai kebutuhan kimia dari tanaman. Pupuk sintesis modern terdiri dari berbagai unsur penyusun utama yaitu, nitrogen, fosfor, dan senyawa kalium dengan nutrisi sekunder lainnya. Penggunaan pupuk buatan telah meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang tersedia saat ini. Akan tetapi penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan diantara ahli lingkungan.

Pupuk dapat menggantikan komponen kimia yang diambil tanaman dari dalam tanah untuk tumbuh. Namun, pupuk juga dirancang untuk meningkatkan potensi pertumbuhan tanah, dan pupuk dapat menciptakan lingkungan tumbuh lebih baik dari tanah alami. Pupuk juga dapat disesuaikan dengan jenis tanaman yang sedang tumbuh.

Komponen utama dalam pupuk adalah nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakan nitrogen dalam proses sintesis protein, asam nukleat dan hormon. Ketika tanaman kekurangan nitrogen pertumbuhan tanaman akan terganggu yang biasanya ditandai dengan menguningnya daun. Tanaman juga membutuhkan fosfor, komponen asam nukleat, fosfolipid, dan beberapa protein. Unsur-unsur tersebut juga diperlukan untuk menyediakan energi untuk mendorong reaksi kimia metabolisme.

Kekurangan fosfor akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang berkurang sehingga membuat tanaman menjadi kerdil. Unsur kalium juga sangat dibutuhkan oleh tanaman, kalium digunakan oleh tanaman dalam proses sintesis protein dan proses pembentukan protein. Menguning, timbul bercak, jaringan mati, dan lemah pada batang dan akar adalah indikasi tanaman yang tidak memiliki cukup kalium.

Selain unsur-unsur tersebut terdapat unsur pendukung yang tidak kalah penting dalam membantu pertumbuhan tanaman, akan tetapi jumlah yang dibutuhkan relatif lebih kecil, unsur-unsur tersebut biasa dinamakan unsur mikro. Yang termasuk unsur mikro diantaranya yaitu, besi, klorin, tembaga, mangan, seng, molibdenum, dan boron. Unsur mikro tersebut berfungsi sebagai faktor pendukung dalam enzimatik reaksi. Meskipun unsur mikro dibutuhkan dalam skala kecil akan tetapi unsur ini juga sangat penting bagi tumbuhan dan tanpa unsur mikro tanaman bisa mati (Engelstad, 2007).

2.1.1 Sejarah Pupuk

Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian daripada sejarah pertanian. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5000 tahun yang lalu. Pemikiran mereka yang menyatakan bahwa kebutuhan bahan kimia sintetik atau bahan yang telah dikembangkan dengan pengetahuan kimia dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan. Bentuk primitif dari penggunaan pupuk dalam memperbaiki kesuburan tanah dimulai dari

kebudayaan tua manusia di daerah aliran sungai Nil, Euphrat, Indus, Cina, dan Amerika Latin. Lahan-lahan pertanian yang terletak di sekitar daerah aliran sungai tersebut sangat subur karena menerima endapan lumpur yang kaya hara melalui banjir yang terjadi setiap tahun (Edowart Sitorus, 2011).

Dalam perkembangannya petani kuno telah mengetahui bahwa hasil panen yang pertama kali pada sebidang tanah jauh lebih baik dari pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan pola pertanian yang dilakukan petani pada waktu itu bersifat nomaden yaitu berpindah dari lahan yang satu ke lahan yang lain yang lebih subur. Dari waktu ke waktu akhirnya ditemukan bahwa pertumbuhan tanaman pada sebidang tanah dapat ditingkatkan dengan menyebarkan kotoran hewan ternak sebagai pupuk kandang di seluruh lahan pertanian mereka.

Seiring waktu teknologi pupuk menjadi lebih maju, zat baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman telah ditemukan. Dari tulisan-tulisan Yunani dan Romawi kuno menunjukkan bahwa para petani sudah menggunakan kotoran ternak mereka sebagai pupuk kandang, mereka menyebarkan di seluruh lahan pertanian mereka. Peradaban islam juga mencatat pemupukan telah menjadi bagian dari pertanian. Dari berbagai temuan teknologi pupuk, maka dalam pembuatan pupuk juga telah ditambahkan bahan lain yang dapat membantu proses pertumbuhan tanaman yang diantaranya yaitu, kerang laut, tanah liat, limbah sayuran, limbah dari proses manufaktur yang berbeda, dan berbagai macam sampah.

Dimulai pada awal abad ke tujuh belas penelitian dan pengembangan dalam teknologi pupuk dilakukan, Francis Bacon dan Johan Glauber seorang ilmuwan kimia telah berhasil mengembangkan pupuk mineral lengkap untuk yang pertama kalinya, pupuk tersebut merupakan campuran dari berbagai zat yang diantaranya yaitu, sendawa, zat kapur, asam fosfat, nitrogen dan kalium. Selanjutnya diceritakan menurut buku *The World Without Us* karya Alan Weisman tahun 2007, dituliskan bahwa awal penemuan pupuk dimulai saat seorang John Bannet Lewis mengamati petani *hertfordshire* yang menggali kapur sisa mahluk laut purba yang terkubur di bawah lapisan lempung tanah untuk ditebarkan pada parit-parit di sekitar ladang mereka. Lewis menemukan bahwa kapur sisa mahluk purba laut tersebut dapat menyuburkan tanaman lobak dan biji-bijian. Dari kuliahnya di *Oxford*, lewis mengetahui bahwa kapur yang ditebarkan petani bukan sebagai makanan tambahan bagi tanaman, melainkan bahan pelunak tanah sehingga tanah tidak terlalu asam. ¹

Seorang ahli kimia jerman, Justus Von Liebig tidak lama sebelumnya mencatat bahwa tulang-tulang yang dijadikan tepung dapat mengembalikan kebugaran tanah. Justus menuturkan bahwa setelah direndam dalam asam sulfat encer bubuk tulang itu akan lebih mudah dicerna tanaman sehingga dapat membantu tanaman untuk berproduksi lebih cepat. Mendengar teori tersebut Lewis tertarik untuk mencoba di ladangnya sendiri, kemudian dia mendapatkan hasil yang memuaskan.

¹ Idham Malik, 2012. "Sejarah Pupuk, Kisah Jhon Bannet Lawes yang Culas", <http://bontocina-kaizen.blogspot.com/2012/01/sejarah-pupuk-kisah-jhon-bennet-lawes.html>. diakses 21 Januari 2013

Dari percobaan tersebut kemudian Lewis mematenkan metode tersebut atas namanya sendiri. Dengan hak paten yang ia dapatkan, ia membangun sebuah pabrik pupuk buatan pertama di dunia yang terletak di *Rothamsted* pada tahun 1841. Tidak lama kemudian ia menjual “Superfosfat” kepada semua tetangganya. Kemudian pabrik pupuknya pindah ke lahan yang lebih besar yaitu di dekat *Greenwich* di Sungai *Thames*. Dari waktu ke waktu penggunaan bahan penyubur tanah kimiawi menyebar ke berbagai daerah, maka Lewis berusaha menyebarkan produknya lebih luas. Ia membangun pabrik-pabrik baru dan menambah daftar produk-produk baru. Produknya tidak hanya bubuk tulang dan mineral fosfat, tetapi juga dua pupuk nitrogen, yaitu natrium nitrat dan ammonium sulfat.

Untuk mempelajari pupuk manakah yang paling efektif, pada tahun 1834 Lewis memulai rangkaian lahan uji yang masih diterapkan sampai sekarang, ia menjadikan *Rothamsted Research* sebagai pusat penelitian pertanian tertua di dunia, selain sebagai pusat penelitian *Rothamsted* juga menjadi tempat eksperimen lapangan berkelanjutan yang paling lama di dunia.

Perkembangan berikutnya semakin pesat dengan ditemukannya teknologi dan metode pembuatan pupuk, industri-industri pertanian semakin giat memproduksi. Hingga tiba sebuah revolusi, khususnya di dunia ketiga seperti di Indonesia, yaitu revolusi hijau, dimana intensifikasi dan massifikasi pertanian dipacu. Dengan logika efisiensi, kecepatan, dan produksi massal, penggunaan pupuk pun semakin meningkat.

2.1.2 Sejarah Pupuk di Indonesia

Sejarah penggunaan pupuk di Indonesia diawali dari penggunaan pupuk kandang oleh petani. Kemudian pupuk kimia mulai diperkenalkan pada awal tahun 70-an, untuk meningkatkan hasil pertanian yang sebelumnya hanya melakukan pemupukan secara tradisional. Pada awalnya tidak banyak petani yang langsung percaya, akan tetapi setelah sosialisasi melalui penyuluhan-penyuluhan, bimbingan masyarakat, dan terbukti peningkatan yang signifikan, maka berbondong-bondong petani mulai mengaplikasikan pupuk kimia. Hingga akhirnya diterapkan di hampir seluruh pelosok nusantara. ²

2.1.3 Sejarah Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Secara filosofis, subsidi pupuk dilakukan untuk membantu meringankan beban petani dalam membiayai usaha taninya. Selain persoalan biaya, petani juga menghadapi persoalan kemampuan dalam mengadopsi teknologi pemupukan untuk peningkatan produktifitas. Sehingga diperlukan terobosan program untuk mengatasi hal ini sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktifitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan adalah program pupuk bersubsidi. Konsep dasar pemberian subsidi untuk petani telah digagas sejak tahun 1970-an.

² Kuku Nus S, 2011. "Sejarah Pupuk Kimia di Indonesia dan Akibatnya bagi Ekosistem", <http://artoboto.blogspot.com/2011/09/sejarah-pupuk-kimia.html>. diakses 22 Januari 2013.

Berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaan, sejarah kebijakan subsidi pupuk dibagi dalam periode :

1. Periode 1970-1998, sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi harga. Sumber pembiayaan berasal dari APBN. Pada periode ini ditetapkan dua jenis pupuk yang disubsidi yaitu, pada tahun 1970-1973 pupuk yang disubsidi adalah pupuk bantuan dari PLN dan pupuk impor yang disubsidi. Kemudian pada tahun 1973-1998 jenis pupuk yang disubsidi adalah pupuk yang diimpor dan pupuk yang diproduksi di dalam negeri.
2. Periode 1999-2001, sejak tahun 1998 subsidi harga pupuk dihapuskan karena terjadinya krisis ekonomi pada saat itu. Sistem subsidi pada tahun ini adalah sistem subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk, sistem subsidi dilakukan dengan cara memberikan insentif gas domestik (IGD) kepada perusahaan produsen pupuk dengan harga gas US\$ 1,3/MMBTU, dimana selisih harga gas yang dipasok kepada produsen pupuk dengan harga gas di pasaran ditanggung pemerintah. Sumber biaya untuk subsidi ini berasal dari APBN dan dana talangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas. PNBP migas berasal dari bagi hasil migas antara pemerintah dengan perusahaan kontraktor migas yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam negeri.
3. Periode 2003-2005, Sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi antara subsidi gas dan subsidi harga. Subsidi gas untuk

pupuk urea, sedangkan subsidi harga untuk pupuk non urea. Subsidi gas untuk pupuk urea dipilih dengan pertimbangan bahwa untuk memproduksi urea diperlukan amoniak yang merupakan hasil reaksi dari gas metana yang berasal dari gas bumi. Sasaran subsidi gas adalah perusahaan produsen pupuk. Pemerintah menetapkan harga gas yang disubsidi US\$ 1,0/MMBTU. Sedangkan subsidi harga pupuk non urea menggunakan formula penjumlahan Harga Pokok Produksi (HPP) dan biaya distribusi yang dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, kemudian dikalikan volume produksi. Jadi petani membeli pupuk non urea dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Sumber dana yang digunakan untuk subsidi pupuk yaitu berasal dari APBN.

4. Periode 2006-sekarang, sistem subsidi pada periode ini merupakan pembaharuan dari sistem subsidi pada periode 2003-2005. Seperti pada periode sebelumnya sistem subsidi di periode ini menggunakan sistem subsidi harga dengan formula selisih antara HET dengan HPP dan biaya distribusi dikalikan volume produksi, akan tetapi yang membedakan yaitu pada periode ini semua pupuk baik urea maupun non urea menggunakan sistem subsidi harga yang sama.

Model subsidi lainnya adalah subsidi kepada penerima manfaat langsung yaitu petani. Salah satu tujuan model ini adalah mengurangi kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Sistem subsidi langsung kepada petani dilakukan dengan dua cara, yaitu memberikan uang tunai kepada petani untuk membeli

pupuk dan melakukan sistem reimbursement, yaitu dengan mengganti uang petani yang dipakai untuk membeli pupuk dengan menukarkan nota pembelian ke bank setempat yang ditunjuk.

2.1.4 Pengertian Pupuk Bersubsidi

Peraturan pupuk bersubsidi untuk kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012. Peraturan ini membahas tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian dan perikanan di Kabupaten Pekalongan. Selain itu peraturan ini juga membahas tentang pengertian istilah-istilah yang terkait dengan subsidi pupuk. Menurut Peraturan ini Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditangani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 hektar. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan, atau perusahaan perikanan budidaya. Petani adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau

bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.

2.1.5 Alokasi Pupuk Bersubsidi

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu berdasarkan usulan kebutuhan teknis di lapangan yang diajukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan didasari pada Program Peningkatan Produksi Pertanian. Usulan kebutuhan pupuk bersubsidi secara bottom up tersebut diproses di tingkat pusat dengan memperhatikan kemampuan daya serap pupuk di masing-masing wilayah selama beberapa tahun terakhir serta anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan pemerintah.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi pada umumnya di bawah kebutuhan teknis yang diusulkan daerah karena terbatasnya anggaran subsidi, sehingga dengan jumlah pupuk bersubsidi yang terbatas tersebut, diharapkan agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas, baik terhadap daerah yang dinilai sebagai sentra produksi, maupun terhadap jenis komoditas yang akan

diunggulkan oleh daerah. Di samping itu, diharapkan dapat dilaksanakannya efisiensi penggunaan pupuk bersubsidi melalui penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan penggunaan pupuk organik.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik. Penyusunan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi mengacu kepada Persetujuan Menteri Negara BUMN kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berikut anak Perusahaannya yaitu PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik.

Menurut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 tahun 2012 alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi dengan mempertimbangkan Alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012. Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 menjelaskan pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci menurut Subsektor, Kecamatan, jenis dan jumlah. Selain itu alokasi pupuk bersubsidi harus memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.

2.1.6 Pengadaan, Penyaluran dan pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan setelah anggaran subsidi untuk pupuk disetujui melalui APBN. Pengadaan pupuk dilaksanakan berdasarkan kebutuhan per provinsi yang dihitung dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian setiap tahunnya. Peraturan Menteri tersebut berisi tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk jumlah dan jenis per kabupaten ditetapkan melalui SK Gubernur dan untuk per kecamatan ditetapkan melalui SK Bupati/Wali Kota.

Agar program pupuk bersubsidi tepat sasaran maka pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005. Artinya peredaran pupuk bersubsidi berada dalam pengawasan pihak-pihak terkait, dan terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Secara umum, pengadaan dan distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian alur distribusi pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini I, yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Dari Lini I pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah Ibu Kota Provinsi dan atau Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar pelabuhan (Lini II).
2. Setelah pupuk dikemas dalam kantong maka pupuk dikirim ke lokasi gundang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III). Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan atau Kelompok Tani melalui pengecer yang ditunjuk.
3. Setelah dari distributor pupuk kemudian dijual kepada Petani dan atau Kelompok Tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer resmi yang selanjutnya disebut pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada Petani dan atau Kelompok Tani.

Dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 menegaskan bahwa peyalur atau pengecer Pupuk Bersubsidi (Lini IV) yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET. HET pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian bersama dengan penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahunnya. HET pupuk bersubsidi per kilogram berdasarkan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Pupuk Urea | Rp 1.800,- per kg |
| b. Pupuk ZA | Rp 1.400,- per kg |
| c. Pupuk SP-36 | Rp 2.000,- per kg |
| d. Pupuk NPK | Rp 2.300,- per kg |
| e. Pupuk Organik | Rp 500,- per kg |

HET tersebut berlaku untuk pembelian pupuk dalam kemasan pupuk 50 kg, 40 kg, 20 kg, secara tunai di kios pupuk pengecer resmi Lini IV.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, penyalur Lini III (distributor), penyalur IV (pengecer resmi) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) daerah berdasarkan prinsip enam tepat. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV di wilayah tanggungjawabnya. Penyalur Lini III (distributor) wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpangan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV (pengecer resmi) setempat. Penyalur Lini IV (pengecer resmi) wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap

perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani setempat. KP3 daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah serta melaporkan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penganggungjawab wilayah. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh KP3 di daerah bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT), dan Ketua Gabungan Kelompok Tani.

2.2 Teori Produksi dalam Usaha Pertanian

Dalam teori ekonomi berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk tujuan itu maka setiap perusahaan menjalankan usaha yang bersamaan yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin sehingga usaha memaksimalkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dipandang sebagai cara yang paling efisien, (Sadono Sukirno, 2009).

Begitu juga dalam menyelenggarakan usaha pertanian setiap petani berusaha agar hasil produksi padinya melimpah disetiap masa panennya. Setiap petani berusaha menjalankan usaha pertaniannya dengan tujuan bagaimana

2.3 Biaya Produksi

Sadono Sukirno (2009), menjelaskan biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan suatu produk tertentu.

Dalam pertanian terdapat dua istilah biaya yang dikeluarkan oleh petani yaitu biaya uang dan biaya in-natura. Biaya uang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan petani berupa biaya tenaga kerja, biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya jasa pembajak sawah, dan biaya sewa tanah apabila lahan yang digunakan merupakan tanah sewa. Sedangkan biaya in-natura yaitu biaya-biaya yang berupa biaya panen, bagi hasil, sumbangan, dan pajak-pajak (Mubyarto, 1989).

Layaknya dalam perusahaan-perusahaan konvensional, dalam usaha pertanian juga terdapat berbagai jenis biaya diantaranya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, misalnya biaya sewa tanah, sedangkan biaya yang lain pada umumnya termasuk kedalam biaya variabel, hal tersebut dikarenakan besar kecilnya biaya berhubungan langsung dengan besarnya produksi. Pengertian tersebut merupakan biaya dalam jangka pendek, sebab dalam jangka panjang biaya tetap dapat menjadi biaya variabel (Mubyarto, 1989).

Bagi para perencana ekonomi yang bertugas merumuskan kebijaksanaan harga, maka sering ditanyakan biaya produksi rata-rata. Akan tetapi dalam usaha pertanian angka biaya produksi rata-rata sangat sukar disusun. Menurut

mubyarto (1989), menjelaskan hal tersebut dikarenakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama bahkan antara petani dalam satu daerah pun bisa berbeda. Karena variasi yang besar ini maka apa yang disebut biaya produksi rata-rata menjadi kehilangan arti bila akan digunakan sebagai bahan kebijakan yang benar-benar realistis bagi seluruh Negara.

Selain itu apa yang disebut biaya produksi total sering belum termasuk nilai tenaga kerja keluarga petani dan biaya lain-lain yang berasal dari dalam keluarga sendiri dan yang sukar ditaksir nilai uangnya. Yang lebih penting bagi petani adalah biaya batas yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menghasilkan satu kesatuan tambahan hasil produksi. Atau dari sudut lain dapat dikatakan pendapatan marginal yaitu tambahan pendapatan yang didapat dengan menambahkan satu kesatuan biaya. Tambahan biaya produksi disini tidak meliputi semua faktor tetapi salah satu faktor produksi saja sedangkan faktor-faktor produksi yang lain tidak berubah.

Dalam usaha pertanian kecenderungan petani dalam mengukur tingkat efisiensi usaha taninya dari sudut besarnya hasil produksi dan tidak pada rendahnya biaya untuk memproduksi hasil itu. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang petani itu sendiri, jika diingat bahwa tujuan utama produksinya adalah pendapatan keluarga terbesar agar kebutuhan makan keluarga dapat dicukupi sepanjang tahun. Sebaliknya segala jerih payah atau biaya untuk memproduksi hasil pertaniannya berupa tenaga kerja dari seluruh anggota keluarga petani tidak dinilai dalam uang. Mereka berpandangan bahwa bekerja

di sawah adalah kewajiban keluarga dan tidak dinilai dalam uang sehingga juga tidak dianggap sebagai biaya.

Keadaan yang sangat berbeda terjadi pada pertanian yang bersifat komersial atau pada perkebunan-perkebunan besar. Tujuan produksi dalam hal ini adalah pasar dan keuntungan. Dalam hal itu setiap hasil yang dijual ke pasar selalu menemui saingan yang mungkin lebih baik. Jika mutu kedua hasil dianggap sama maka pembeli akan memilih barang yang harganya murah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani yang sudah komersil akan sangat berkepentingan untuk memproduksi hasil pertaniannya semurah-murahnya bila ia tidak ingin menderita kerugian.

Dalam kenyataan tidak ada petani yang 100 persen komersil tetapi juga tidak ada yang 100 persen subsisten. Mereka pada umumnya di dalam transisi dari pertanian yang subsisten menuju ke pertanian komersil. Bagi petani-petani yang demikian maka unsur biaya produksi sudah mulai masuk perhitungannya. Namun begitu yang ada di dalam pikiran petani tidaklah supaya padi dapat diproduksi semurah-murahnya tetapi bagaimana cara ia dapat mencapai hasil produksi yang sebesar-besarnya dengan sekaligus berusaha agar biaya yang harus dikeluarkan terutama biaya-biaya yang berupa uang dapat ditekan serendah mungkin.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Nama Pengarang	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani	2004	Valeriana Darwis dan A. Rozany Nurmanaf	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Studi Pustaka	Dari beberapa kasus mengindikasikan bahwa kelangkaan pupuk terjadi akibat sistem distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat lainnya adalah petani harus membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal, terlebih semenjak diberlakukannya kebijakan pengurangan dan penghapusan subsidi harga pupuk. Secara umum harga pupuk bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penggunaan pupuk pada petani. faktor-faktor yang lebih menentukan adalah harga jual produk pertanian, kemampuan menyediakan modal, dan kesuburan lahan yang dimiliki petani.
2.	The Impact of fertilizer Subsidy on Paddy Cultivation in Sri Lanka	2005	H.K.J. Ekanayake	Analisi Regresi	Hasil regresi menunjukkan perubahan harga pupuk dan harga padi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan pupuk, disamping itu subsidi pupuk bukan penentu utama dalam penggunaan pupuk dalam budidaya tanaman padi.

					Hasil studi juga menemukan bahwa ada hubungan yang relatif lebih tinggi antara penggunaan pupuk dan harga padi dibandingkan antara penggunaan pupuk dan harga pupuk.
3.	Study Komprehensif Kebijakan Subsidi Pupuk Di Indonesia	2007	Zulkifli Mantau dan Faisal	Study Deskriptif Komprehensif dan Study Pustaka	Dari study yang dilakukan terdapat cukup banyak faktor yang mempengaruhi besaran subsidi pupuk, sebagian besar faktor tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan antar departemen. Sistem pemberian subsidi dan pendistribusian pupuk yang diterapkan selama ini belum cukup efektif dan belum sesuai dalam upaya memenuhi enam azas tepat yang ditargetkan.
4.	Fertilizer Subsidy in India: Who are the Beneficiaries?	2009	Vijay Paul Sharma dan Hrima Thaker	Study Deskriptif Komprehensif dan Study Pustaka	Dari study yang dilakukan penulis dari tahun ke tahun penggunaan pupuk bersubsidi di India meningkat pesat, hal ini menyebabkan anggaran subsidi pupuk juga mengalami peningkatan. Selain itu hasil study juga menunjukkan bahwa subsidi pupuk hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja, yaitu Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, madhya Pradesh, dan Punjab. Namun dari tahun ketahun kesenjangan

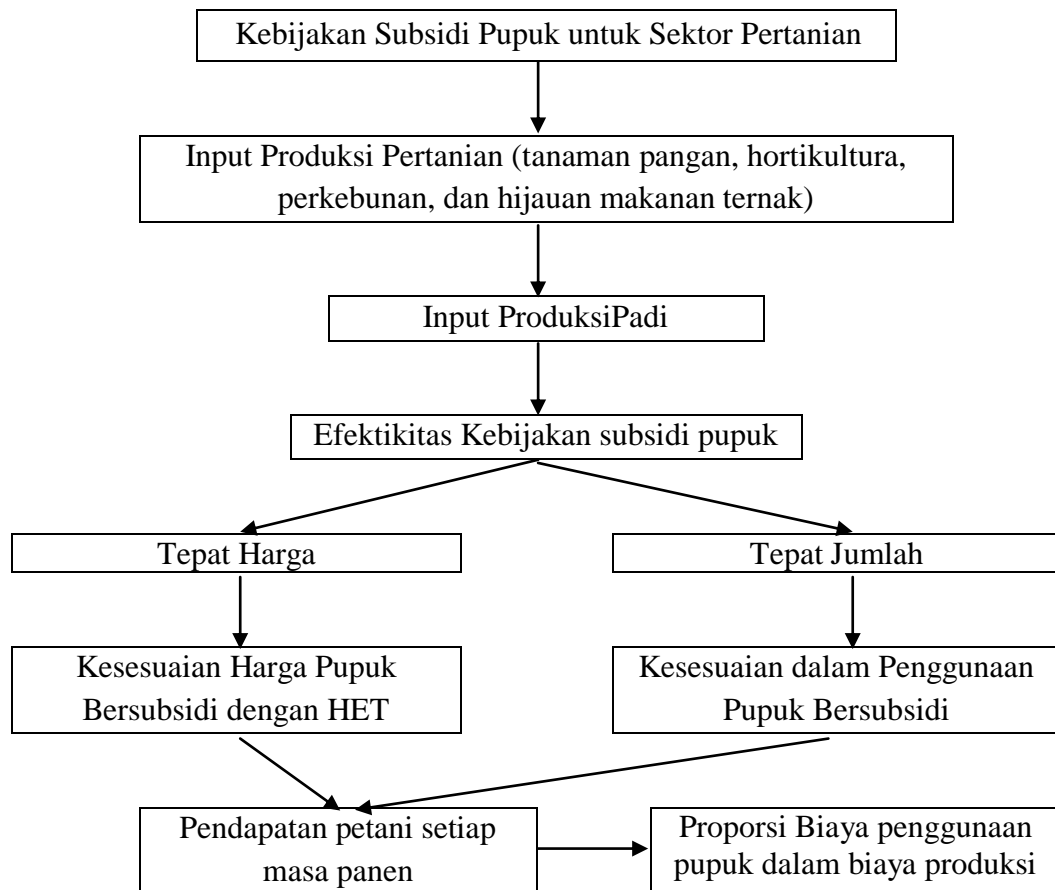
					<p>distribusi pupuk bersubsidi semakin menurun walaupun masih bisa dikatakan cukup tinggi. Temuan lain menunjukkan bahwa para petani kecil memiliki andil besar dalam penggunaan pupuk bersubsidi dibandingkan dengan petani yang berada di kawasan budidaya, manfaat subsidi pupuk telah menyebar sampai daerah pertanian tanpa irigasi, dengan menggunakan pupuk daerah tersebut dapat meningkatkan produksinya sebesar 41 %.</p>
5.	Analisis Dampak Subsidi Harga Pupuk Terhadap Output Sektor Produksi dan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah	2010	Sri Kasiati	Input-Output (I-O) dan Sosial Accounting Matrices (SAS)	<p>Kebijakan subsidi harga pupuk yang dilakukan pemerintah melalui Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah menyebabkan seluruh sektor dalam perekonomian Jawa Tengah dapat menambah outputnya. Sektor yang memiliki perubahan output tertinggi adalah sektor industri kimia dan pupuk, hal ini dikarenakan sektor ini memproduksi pupuk sebagai outputnya sehingga adanya subsidi dari pemerintah berpengaruh terhadap produksi yang dilakukan.</p> <p>Subsidi Harga pupuk juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.</p>

6.	Analisis Biaya dan Pendapatan Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Pertanian Padi di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)	2010	Wahyu Ardiyanto, <i>et al</i>	Analisis Deskriptif Kualitatif	Dari perhitungan dan perbandingan berbagai pembiayaan input dalam usaha pertanian padi proporsi biaya terbesar yaitu biaya sewa lahan pesawahan, dan pendapatan bersih yang diterima petani yaitu sebesar Rp 8.731.077 per musim taman.
----	--	------	-------------------------------	--------------------------------	---

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kebijakan subsidi pupuk ditetapkan adalah untuk membantu sektor pertanian terutama berkaitan dengan penghematan input produksi bagi petani. Pengadaan pupuk bersubsidi adalah dari produsen dengan sistem rayonisasi yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang Cikampek, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang bertanggungjawab pada ketersediaan setiap pupuk pada masing-masing daerahnya. Penyaluran pupuk bersubsidi diatur berdasarkan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah dari Lini I sampai kepada petani. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini juga diadakan pengawasan terutama berkaitan dengan prinsip enam tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari pengawasan ini akan ada suatu evaluasi tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh KP3 daerah. Pada penelitian ini akan membahas efektivitas kebijakan HET pupuk bersubsidi dan Dosis penggunaannya terutama berkaitan dengan produksi padi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Kerangka pemikiran akan dijelaskan pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



Pada Gambar 2.1 dapat ditunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian berupa penetapan HET pada pupuk. Penetapan HET ini bertujuan untuk membantu biaya produksi pertanian. Penelitian ini fokus pada produksi padi. Untuk mengukur efektifitas kebijakan subsidi pupuk terdapat 6 indikator yang dapat digunakan, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah indikator tepat harga dan tepat jumlah. Indikator tepat harga dapat dilihat berdasarkan kesesuaian harga pupuk bersubsidi yang dibeli petani dengan HET yang ditetapkan pemerintah, untuk indikator tepat jumlah dapat

dilihat berdasarkan penggunaan pupuk oleh para petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Kemudian bagaimana pengaruh kedua hal tersebut terhadap pendapatan yang didapatkan petani setiap masa panen. Dari berbagai biaya berapa besar biaya yang digunakan oleh petani untuk membeli pupuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan, Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara kepada petani-petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagai responden. Jumlah responden ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin yang kemudian diketahui jumlah responden yaitu sebanyak 100 orang.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara semi terbuka kepada petani di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menggunakan instrumen kuisioner. Penentuan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memungkinkan untuk memilih contoh berdasarkan pertimbangan tentang karakteristik yang cocok dalam penelitian ini. Hal yang menjadi pertimbangan pada penentuan sampling ini adalah berdasarkan data sasaran luas tanam padi di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Dalam penentuan sampel yang akan digunakan untuk menaksir populasi, maka dalam mengambil sampel dari populasi tertentu kita harus benar-benar

bisa mengambil sampel yang dapat mewakili populasinya atau disebut sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya. Tingkat kerepresentatifan sampel yang diambil dari populasi tertentu sangat tergantung pada jenis sampel yang digunakan, ukuran sampel yang diambil, dan cara pengambilannya (Bambang dan Lina, 2005).

Dalam menentukan ukuran sampel yang harus diambil agar memenuhi persyaratan representatif tidak ada kesepakatan bulat di antara para ahli metodologi penelitian. Pada umumnya buku-buku metodologi penelitian menyebut angka 5 persen hingga 10 persen untuk menegaskan berapa ukuran sampel yang harus diambil dari sebuah populasi tertentu dalam penelitian sosial (Bambang dan Lina, 2005).

Dalam penelitian ini untuk menentukan besarnya sampel yang akan digunakan ditentukan dengan Rumus Slovin dengan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)

Untuk menggunakan rumus tersebut hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan besarnya batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan merupakan taraf seberapa besar kemungkinan terjadinya kebenaran karena kebetulan saja benar. Semakin kecil toleransi kesalahan maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Dalam menentukan jumlah sampel

dengan menggunakan Rumus Slovin jumlah anggota populasi harus diketahui besarnya, jika populasi tidak diketahui jumlah anggota populasinya (populasi tak terhingga), maka rumus ini tidak dapat digunakan.

Dalam Penelitian ini anggota populasi yang diambil adalah Jumlah Penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kecamatan Kesesi tahun 2011. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Dari data tersebut dapat jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian padi dan palawija yaitu sebesar 13.686 jiwa. Kemudian data tersebut akan digunakan sebagai Populasi untuk menentukan besarnya Sampel dalam Penelitian ini. Besarnya tingkat toleransi kesalahan ditentukan dengan pertimbangan bidang penelitian. Dalam penelitian di bidang agrobisnis besarnya toleransi kesalahan adalah 0,1. Artinya tingkat akurasi sampel untuk mewakili populasi sebesar 90 persen.

Dengan menggunakan Rumus Slovin maka dapat dihitung besarnya sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{13686}{1 + 13686 \times 0.1 \times 0.1}$$

$$n = \frac{13686}{1 + 13686 \times 0.01}$$

$$n = \frac{13686}{137,86}$$

$$n = 99.27$$

Setelah dihitung telah ditemukan besarnya sampel sebesar 99,27 kemudian dibulatkan ke atas menjadi 100 orang. Kemudian pengambilan

sampel akan dilakukan kepada petani yang tersebar di 23 Desa di Kecamatan Kesesi. Ketentuan pengambilan sampel akan dijelaskan pada Tabel 3.1.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat penggunaan lahan sawah di Kecamatan Kesesi berdasarkan jenis irigasinya. Data tersebut menunjukkan sebagian besar lahan sawah di Kecamatan Kesesi sudah menggunakan sistem irigasi teknis. Air irigasi di sawah Teknis ini mengalir terus menerus sepanjang tahun, sehingga keberadaan sawah ini tidak tergantung pada musim sehingga dalam satu tahun dapat ditanami padi sebanyak dua hingga tiga kali. Dengan demikian kebutuhan pupuk yang digunakan juga tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sampel dari penelitian ini diambil dari 20 desa dengan jenis sawah beririgasi teknis tersebut. Untuk mempermudah pengambilan sampel penulis membagi wilayah kecamatan Kesesi dalam 5 kelompok berdasarkan letaknya yaitu blok utara, blok selatan, blok timur, blok utara, dan blok tengah. Dari setiap blok diambil 2 desa dengan luas lahan terluas, diantaranya yaitu:

Blok Utara : Desa Mulyorejo dan Desa Kwigaran

Blok Timur : Desa Jagung dan Desa Watugajah

Blok Tengah : Desa Karyomukti dan Desa Kaibahan

Blok Barat : Desa Sidomulyo dan Desa Kesesi

Blok Selatan : Desa Brondong dan Desa Kwasen

Kemudian setiap desa tersebut masing-masing diambil 10 responden (petani) sehingga semuanya berjumlah 100 responden sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin.

Tabel 3.1
Luas Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Kesesi berdasarkan jenis sistem irigasi tahun 2011

Satuan m²

Desa	Tehnis	½ tehnis	Sederhana	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lainnya	Sementara tidak diusahakan	Jumlah
Windurojo	-	-	128.000	147.283	-	-	-	275.283
Ujungnegoro	-	97.695	-	27.000	-	-	-	124.695
Brondong	10.858	55.586	-	78.017	-	-	-	144.461
Podosari	-	147.345	-	-	-	-	-	147.345
Kwasen	212.982	-	50.937	20.407	-	-	-	284.326
Langensari	92.035	-	-	16.440	-	-	-	108.475
Jagung	183.313	-	-	5,000	-	-	-	188.313
Watugajah	125.881	-	-	11,000	-	-	-	136.881
Karangrejo	108.203	-	-	-	-	-	-	108.203
Karyomukti	148.210	-	-	29,935	-	-	-	178.145
Kesesi	240.924	-	-	65.524	-	-	-	306.448
Srinahan	50.284	-	-	-	-	-	-	50.284
Kaibahan	160.616	-	-	850	-	-	-	161.466
Watupayung	68.500	40.000	-	-	-	-	-	108.500
Krandon	173.210	-	-	9.760	-	-	-	182.970
Ponolawen	127.807	-	-	-	-	-	-	127.807
Kalimade	76.214	-	-	4.445	-	-	-	80.659
Sidomulyo	144.426	-	-	-	-	-	-	144.426
Sukorejo	120.020	-	-	-	-	-	-	120.020
Sidosari	184.837	11.168	-	-	-	-	-	196.005
Mulyorejo	114.838	-	-	-	-	-	-	114.838
Pantirejo	107.284	-	-	-	-	-	-	107.284
Kwigaran	134.885	-	-	-	-	-	-	134.885

Sumber : Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2011

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode analisis sederhana yaitu, metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur ketepatan harga dan kesesuaian dosis pemakaian pupuk oleh petani, untuk mengukur tingkat pendapatan yang diperoleh petani setiap masa panen dan menentukan proporsi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

Untuk menghitung ketepatan dan kesesuaian indikator harga dan dosis penggunaan pupuk akan dihitung menggunakan rumus berikut ini.

Ketepatan Harga

$$dP = Pr - Pp \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

dP = perbedaan harga (Rp)

Pr = harga yang diterima responden (Rp)

Pp = harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah (Rp)

Kesesuain Dosis Penggunaan Pupuk

$$dQ = Qr - Qp \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan :

dQ = perbedaan jumlah (kg/ha)

Qr = jumlah pupuk yang dipergunakan oleh responden (kg/ha)

Qp = jumlah pupuk yang disarankan oleh pemerintah (kg/ha)

Ketepatan harga diukur berdasarkan rumus (3.2). Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat selisih antara harga aktual dengan HET. Setelah itu dilakukan perbandingan antara responden yang membeli pupuk bersubsidi dengan harga sesuai HET dan responden yang membeli pupuk bersubsidi dengan harga tidak sesuai HET. Hasil dari perbandingan responden tersebut ditransformasi dalam bentuk persen. Apabila presentasi tepat harga sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam penetapan HET sudah sesuai dan berjalan dengan baik, namun apabila hasil yang menunjukkan fakta yang sebaliknya maka kebijakan HET belum berjalan sebagaimana mestinya.

Indikator terakhir dalam penentuan efektivitas kebijakan subsidi pupuk adalah indikator tepat jumlah. Pengukuran tepat jumlah ini berdasarkan selisih antara jumlah aktual dengan jumlah seharusnya yang dijelaskan pada rumus (3.3). Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran dengan responden yang menggunakan pupuk tidak sesuai anjuran dalam bentuk persen. Apabila persentase responden yang menggunakan pupuk sesuai anjuran sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan efektif pada indikator tepat jumlah. Dari keseluruhan persentase indikator dibuat rata-ratanya dalam bentuk persen. Apabila rata-rata tingkat ketepatan sama dengan atau lebih dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa kebijakan subsidi pupuk sudah efektif.

Kemudian untuk menentukan besarnya proporsi biaya-biaya yang telah dikeluarkan petani dihitung dengan cara masing-masing dari biaya tersebut dibagi total biaya keseluruhan kemudian dikalikan 100 persen maka akan didapat proporsi biaya produksi dalam bentuk persen. Untuk menentukan besarnya pendapatan bersih yang diterima petani setiap masa panen digunakan penghitungan sederhana dengan mencari selisih antara pendapatan produksi petani dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani, jika dirumuskan akan menjadi formula sebagai berikut.

$$\pi = TR - TC$$

Dimana :

- π = pendapatan bersih petani
- TR = pendapatan kotor petani
- TC = biaya keseluruhan yang dikeluarkan petani